

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Oleh :

Prof. M. Handry Imansyah, MAM, Ph. D
M. Arliyan Syahrial, M.Pd,
H. Muhammad Afif Bizri, SH,M.Hum, Hairul Ikhwan, S.Hut.
Hj. Rusmaliah, S.Hut. Yunita Anggeriana, S.Hut.

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan fungsi dan kewenangan Pemerintah Daerah maka diperlukan adanya kemampuan keuangan daerah yang mampuni, potensi kemampuan keuangan suatu daerah dapat terus meningkat dengan memaksimalkan pendapatan dan mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya.

Hampir seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia menghadapi masalah yang sama, yaitu terbatasnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerahnya karena kurangnya dana dan sumber pendanaan di daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kondisi ini tentu berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang mana merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, hal tersebut dilakukan untuk melihat hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh suatu negara atau suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang.

Dengan demikian, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila pendapatan riil masyarakat tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan sejauh mana produktifitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu.



Pertumbuhan ekonomi merupakan proses dari tahapan kemajuan ekonomi selanjutnya, yaitu dengan adanya kesempatan kerja dan produktifitas serta distribusi pendapatan. Untuk mengetahui sejauh mana pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah adalah dengan mengetahui tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan total nilai barang dan jasa yang diproduksi di daerah tersebut. Peningkatan PDRB mengindikasikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang lebih baik.

Ringkasan

Kebijakan fiskal daerah yang efektif menuntut keseimbangan antara efisiensi dan keadilan (Stiglitz, 2018). Pendelegasian kewenangan keuangan kepada pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi penyediaan layanan publik apabila disertai dengan kapasitas kelembagaan yang memadai (Oates, 1999).

Prinsip ini penting bagi Kab. HSS yang sedang berupaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan fiskal yang ketat. Selama dua dekade terakhir, HSS menunjukkan peningkatan signifikan dalam volume anggaran daerah, namun tidak selalu diikuti oleh peningkatan proporsional pada kinerja ekonomi. Hal ini menandakan adanya inefisiensi struktural fiskal, di mana peningkatan belanja publik belum sepenuhnya menghasilkan multiplier ekonomi yang optimal.

Struktur anggaran yang masih didominasi oleh belanja operasional (lebih dari 70%) membatasi kemampuan daerah untuk membiayai investasi produktif jangka panjang melalui belanja modal.

Sebagai daerah agraris dengan karakteristik wilayah perbukitan dan sungai, potensi utama HSS berada pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan lainnya. Namun, keterbatasan infrastruktur, ketimpangan spasial, dan minimnya industri pengolahan menyebabkan nilai tambah ekonomi masih rendah. Maka, harus ada peningkatan kualitas belanja publik dan diversifikasi sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Analisis integratif atas data 2021–2023 menunjukkan bahwa:

- Efisiensi fiskal belum optimal, meskipun tren belanja modal meningkat.
- Pertumbuhan ekonomi stabil tetapi belum inklusif, kontribusi sektor produktif terbatas.
- Indikator sosial membaik signifikan, ditandai oleh IPM tinggi dan ketimpangan rendah.
- Ketergantungan terhadap DAU masih dominan, menuntut inovasi PAD dan efisiensi belanja.

Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Jangka Pendek – Menengah) seperti : Percepatan realisasi APBD, Percepatan realisasi investasi, Percepat realisasi proyek infrastruktur, Pengendalian harga–inflasi, Peningkatan produktifitas pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan industri berbasis potensi lokal, Perluasan kesempatan kerja, Mempermudah perizinan berusaha.

Rekomendasi Utama 2025–2029 : a. Tingkatkan belanja modal produktif hingga 30% dari APBD. b. Terapkan digitalisasi PAD dan *performance-based budgeting*. c. Perkuat sinergi Banua Selatan Raya untuk konektivitas ekonomi. d. Fokus pada transformasi sektor unggulan. e. Bentuk *Fiscal Innovation Unit* di bawah Bappalitbangda.

TINJAUAN KEBIJAKAN

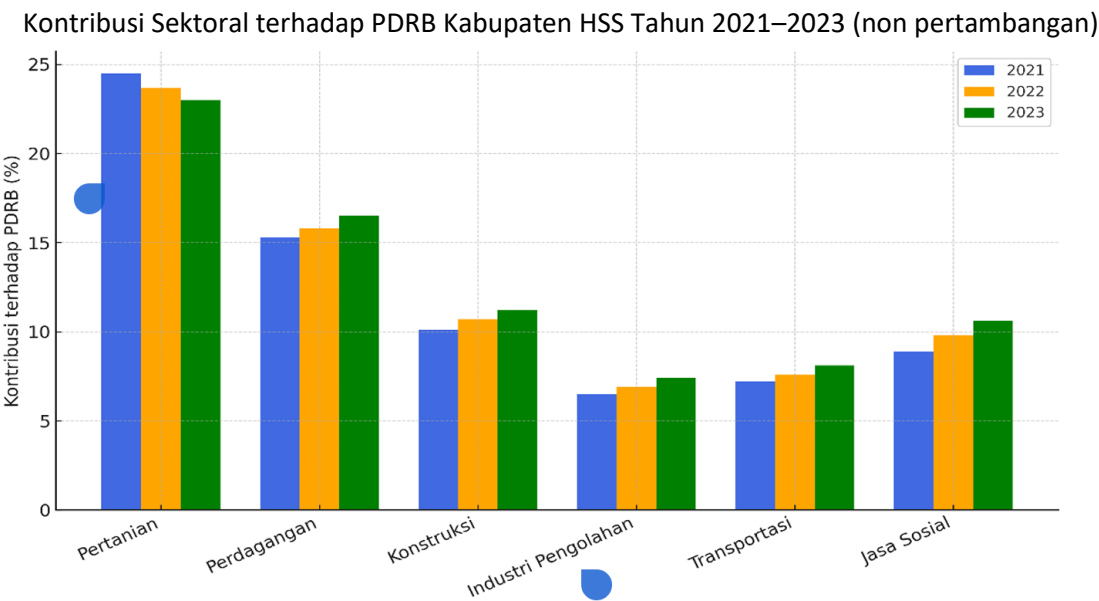
Kebijakan fiskal daerah yang efektif menuntut keseimbangan antara efisiensi dan keadilan. Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, teori desentralisasi fiskal menegaskan bahwa pendelegasian kewenangan keuangan kepada pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi penyediaan layanan publik apabila disertai dengan kapasitas kelembagaan yang memadai.

Prinsip ini penting bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), yang sedang berupaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan fiskal yang ketat. Selama dua dekade terakhir, HSS menunjukkan peningkatan signifikan dalam volume anggaran daerah, namun tidak selalu diikuti oleh peningkatan proporsional pada kinerja ekonomi. Hal ini menandakan adanya inefisiensi struktural fiskal, di mana peningkatan belanja publik belum sepenuhnya menghasilkan multiplier ekonomi yang optimal.

PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih sangat didukung oleh sektor komoditas pertambangan dan pertanian yang rentan dengan resiko. PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023 masih sangat didukung oleh sektor komoditas pertambangan mencapai 20,53% dan sektor pertanian mencapai 20,48%, sedangkan kontribusi sektor non pertambangan dan non pertanian terhadap PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai 58,99%. Rendahnya kontribusi sektor non pertambangan dan non pertanian disebabkan karena sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor perdagangan dan sektor- sektor lainnya kontribusinya masih kecil dan belum mampu menjadi sektor andalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Menurut data CALK LKPD (2021–2023), pertumbuhan ekonomi HSS bergerak di kisaran 4,84% (2021) hingga 5,27% (2023), dengan sektor pertanian tetap menjadi kontributor terbesar bersama pertambangan. Pada 2023, PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp13,5 triliun, di mana pertanian menyumbang 23%, perdagangan 17%, dan konstruksi 13%. Sementara itu, sektor industri pengolahan masih di bawah 10%. Sektor pertanian masih mendominasi PDRB dengan kontribusi sekitar 23–24%, meski cenderung menurun seiring pergeseran tenaga kerja ke sektor jasa. Sektor perdagangan dan jasa sosial menunjukkan tren peningkatan konsisten, menandakan akselerasi ekonomi domestik dan perbaikan pelayanan publik. Sedangkan Industri pengolahan dan transportasi tumbuh moderat namun menjadi sektor strategis untuk diversifikasi ekonomi ke depan.

Kondisi ini menegaskan pentingnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada sektor-sektor bernilai tambah tinggi, termasuk penguatan rantai nilai agroindustri dan jasa berbasis masyarakat. Kebijakan pembangunan yang berpihak pada sektor-sektor bernilai tambah tinggi merupakan strategi pemerintah untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi ke sektor-sektor yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap PDB, menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan daya saing, serta memperkuat struktur ekonomi, seperti pertanian, pariwisata, industri dan ekonomi kreatif serta ekonomi digital.



Dari LKPD Audited 2021–2023, pendapatan daerah HSS Rp1,73 triliun (2023). Namun, PAD hanya menyumbang 12–15% dari total pendapatan, menunjukkan ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat. Transfer pusat yang dimaksud adalah seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Pendapatan Daerah HSS 2021–2023 (dalam miliar rupiah)			
Sumber Pendapatan	2021	2022	2023
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	164,2	187,3	211,8
Dana Transfer Pusat	1.070,4	1.281,7	1.442,9
Lain-lain Pendapatan Sah	104,1	72,8	80,5
Total	1.338,7	1.541,8	1.735,2

Sumber: BPKAD HSS, 2024.

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini menandakan kemandirian fiskal daerah masih rendah, karena kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan sendiri (pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain) masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya fleksibilitas daerah dalam menentukan arah pembangunan sesuai potensi lokal, keterlambatan pelaksanaan program akibat ketergantungan jadwal transfer pusat, dan rendahnya inovasi fiskal dan optimalisasi potensi ekonomi daerah.

Kalau dilihat di sisi belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rentang 20 tahun terakhir (2004-2023) terjadi peningkatan yang signifikan. Seperti pada tahun 2021 sebesar Rp. 1,42 triliun menjadi Rp1,59 triliun di tahun 2023, dengan rata-rata pertumbuhan 13,6% per tahun.

Adapun dalam rentang 20 tahun ini rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan di angka 4,79%. Dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2018 di angka 6,18%, sedangkan yang terkecil terjadi ketika covid-19 tahun 2020 dengan pertumbuhan ekonomi di angka -1,19%.

Peningkatan Belanja Daerah tidak selaras dengan pertumbuhan ekonomi, hal ini menggambarkan bahwa kenaikan anggaran pemerintah belum memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, meskipun pemerintah daerah mengeluarkan belanja lebih besar setiap tahun, namun pada akhirnya pertumbuhan ekonomi tidak meningkat secara proporsional.

Kondisi ini dapat disebabkan oleh:

- Proporsi belanja operasional (gaji pegawai, perjalanan dinas, administrasi) yang terlalu besar dibanding belanja modal produktif;
- Kurangnya efektivitas dan efisiensi program pembangunan;
- Minimnya sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan hasil pembangunan (output dan outcome);
- Investasi daerah yang rendah di sektor-sektor yang memiliki efek pengganda tinggi terhadap ekonomi (pertanian, UMKM, industri pengolahan, pariwisata dan jasa produktif).

Kondisi proporsi belanja operasional (gaji pegawai, perjalanan dinas, administrasi) yang terlalu besar dibanding belanja modal produktif ini dapat dilihat jelas dalam perbandingan dua belanja di tahun 2021-2023, dimana proporsi belanja operasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih dominan (sekitar 75%), sedangkan belanja modal hanya 20%.

Grafik ini menunjukkan peningkatan belanja modal dari 16,5% ke 20,6%. Belanja operasi sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai (sekitar 48%), sedangkan belanja modal difokuskan pada infrastruktur publik dan pelayanan dasar seperti irigasi, jalan, dan fasilitas kesehatan.

Analisis jangka panjang menunjukkan belanja daerah meningkat dari Rp. 170,9 miliar (2004) menjadi Rp. 1,59 triliun (2023). Namun, pertumbuhan ekonomi hanya naik dari 4,49% ke 5,27%. Ini mencerminkan output elasticity 0,35, artinya setiap kenaikan 10% belanja daerah hanya mendorong pertumbuhan sekitar 3–4%.

Gap besar antara kenaikan belanja dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan efisiensi rendah. Terlihat bahwa lonjakan belanja pasca-desentralisasi belum memberikan efek proporsional terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa anggaran pemerintah belum memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, meskipun pemerintah daerah mengeluarkan belanja lebih besar setiap tahun, namun pada akhirnya pertumbuhan ekonomi tidak meningkat secara proporsional.

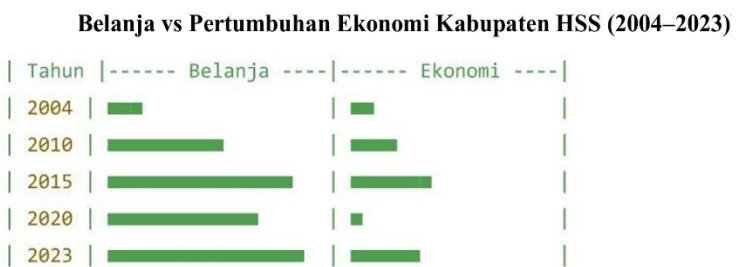
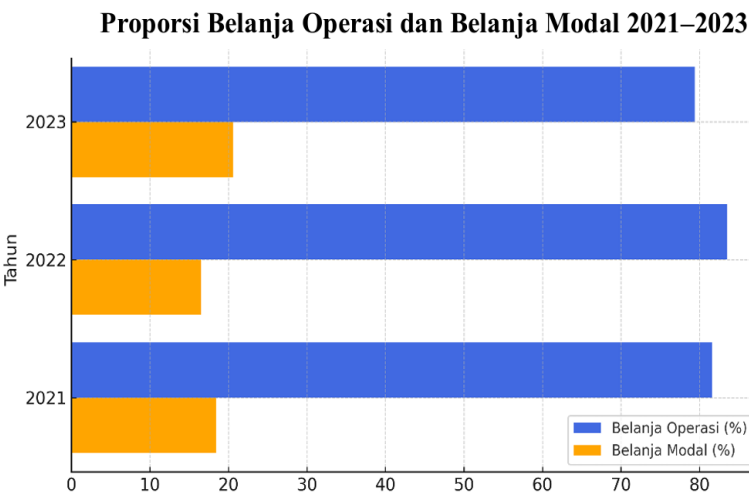
Kondisi ketidaksinkronan ini berpotensi menghambat terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena belanja publik tidak mendorong kegiatan ekonomi riil, menghambat kemandirian fiskal daerah, akibat rendahnya dampak belanja terhadap peningkatan PAD dan pertumbuhan ekonomi, serta daya saing daerah, karena infrastruktur dan sektor produktif tidak berkembang optimal.

Kondisi ini diperparah dengan ketergantungan Kabupaten pada dana transfer pusat, yang menunjukkan kemampuan daerah untuk menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah, struktur ekonomi daerah masih

Belanja Daerah, Pertumbuhan Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2004-2023

No	Tahun	Belanja Daerah (Rp1.000)	Pertumbuhan Belanja Daerah (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2004	170.938.181	-	4,49
2	2005	183.617.541	7,42	3,51
3	2006	260.587.886	41,92	4,97
4	2007	399.545.934	53,32	5,11
5	2008	478.973.820	19,88	5,13
6	2009	547.092.674	14,22	5,04
7	2010	499.541.679	-8,69	3,46
8	2011	635.573.011	27,23	5,48
9	2012	722.208.830	13,63	5,18
10	2013	792.561.666	9,74	5,68
11	2014	887.367.010	11,96	5,79
12	2015	1.234.231.773	39,09	6,05
13	2016	1.327.060.321	7,52	6,08
14	2017	1.205.337.331	-9,17	6,12
15	2018	1.257.396.522	4,32	6,14
16	2019	1.406.270.395	11,84	5,28
17	2020	1.326.747.578	-5,65	-1,19
18	2021	1.420.783.809	7,09	4,19
19	2022	1.408.914.769	-0,83	4,02
20	2023	1.598.649.439	13,47	5,27
Rata-rata			13,60	4,79

Sumber: Pemerintah Kab. HSS dan BPS Kab HSS, diolah kembali.



lemah dan belum menghasilkan sumber pajak dan retribusi yang memadai, dan kemandirian fiskal daerah belum tercapai, sehingga daerah sangat tergantung pada kebijakan fiskal pusat.

Penerimaan DAU Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada periode 2004- 2023 (selama 20 tahun) pertumbuhannya mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Rata- rata pertumbuhan per tahun selama 20 tahun terakhir mencapai 7,62%, keadaan ini menunjukan pertumbuhan yang cukup tinggi.

Peningkatan transfer ke daerah dalam bentuk DAU dapat mengindikasikan beberapa kondisi penting terkait dengan struktur fiskal dan kemandirian keuangan daerah, seperti ; daerah masih sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan operasional dan pembangunan, pemerintah pusat sedang berupaya memperkuat pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan juga dapat mengindikasikan bahwa daerah belum optimal dalam menggali potensi ekonomi lokal, seperti pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset, dan investasi daerah.

PAD Kab. HSS dalam 20 tahun (2024-2023) terakhir sebenarnya mengalami peningkatan yang signifikan dengan rata-rata peningkatan pertahun sebesar 18,82%. Namun peningkatan ini masih belum bisa menjawab akan besarnya anggaran yang harus digunakan dalam pembangunan daerah dan masih ketergantungan dengan transfer pusat.

Peningkatan PAD ini menunjukkan bahwa daerah mulai berhasil menggali potensi fiskalnya, seperti pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset, dan hasil usaha daerah, mamun peningkatan tersebut belum mampu memandirikan daerah karena proporsi PAD masih kecil dibanding total pendapatan daerah (PAD hanya menyumbang 12–15% dari total pendapatan Kab. HSS), Dana transfer dari pusat (terutama DAU dan DAK) masih mendominasi struktur pendapatan dan kontribusi PAD terhadap pembiayaan belanja daerah belum signifikan. Dengan kata lain, kemandirian fiskal masih rendah meskipun terjadi kenaikan nominal PAD.

Kondisi ini semakin menjadi tantangan dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengurangi transfer ke daerah di tahun 2026. Kab. HSS pada tahun 2025 menerima dana trasnfer pusat sebesar Rp. 1,3 triliun dan diproyeksikan akan turun pada tahun 2026 menjadi Rp. 1,1 triliun atau akan turun sekitar Rp. 200 milyar atau turun sebesar 20,59%. Penurunan drastis ini akan menggerus kapasitas fiskal daerah, terutama untuk membiayai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Di lain sisi, belanja pemerintah yang selama ini menjadi motor pertumbuhan lokal akan melemah, menurunkan permintaan barang dan jasa, serta memperlambat aktivitas ekonomi di tingkat kabupaten/kota. Ketimpangan fiskal antar wilayah juga berpotensi melebar karena tidak semua daerah memiliki basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat. Ada beberapa pilihan strategi adaptif yang realistis dan mudah diterapkan.

Pertama, rasionalisasi belanja harus selektif dan berbasis prioritas. Pemangkasan anggaran tidak boleh dilakukan merata. Belanja perjalanan dinas, acara seremonial, dan hibah nonproduktif perlu dibabat drastis, sementara belanja produktif seperti kesehatan, pendidikan, dan pemeliharaan infrastruktur harus dipertahankan. Penggunaan sistem digital dalam pengadaan dan administrasi juga dapat memangkas biaya birokrasi serta menutup celah inefisiensi.

Analisis simulatif menunjukkan bahwa peningkatan proporsi belanja modal dari 21% ke 30% akan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6,5% per tahun dan menaikkan PAD hingga 25% dalam dua tahun.Peningkatan porsi belanja modal dari 21% menjadi 30% menunjukkan dampak positif terhadap dua indikator utama:

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pertumbuhan DAU
Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2004-2023

No	Tahun	DAU (Rp1.000)	Pertumbuhan DAU (%)
1	2004	139.608.000	-
2	2005	153.812.000	10,17
3	2006	246.014.000	59,94
4	2007	269.401.929	9,51
5	2008	293.908.862	9,10
6	2009	294.246.568	0,11
7	2010	298.470.960	1,44
8	2011	324.267.511	8,64
9	2012	388.394.992	19,78
10	2013	452.522.473	16,51
11	2014	478.093.768	5,65
12	2015	482.751.537	0,97
13	2016	532.162.390	10,24
14	2017	522.814.008	-1,76
15	2018	522.814.008	0,00
16	2019	538.186.183	2,94
17	2020	482.100.383	-10,42
18	2021	474.753.627	-1,52
19	2022	473.900.465	-0,18
20	2023	491.370.004	3,69
Rata-rata			7,62

Sumber: Pemerintah Kab. HSS dan BPS Kab HSS, diolah kembali

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan PAD
Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2004-2023

No	Tahun	PAD (Rp1.000)	Pertumbuhan PAD (%)
1	2004	11.734.211	-
2	2005	10.719.545	-8,65
3	2006	17.453.411	62,82
4	2007	22.429.258	28,51
5	2008	22.331.666	-0,44
6	2009	28.152.514	27,08
7	2010	27.931.098	-0,79
8	2011	41.712.778	49,34
9	2012	45.107.436	8,14
10	2013	54.748.428	21,37
11	2014	85.095.560	55,43
12	2015	101.673.712	19,48
13	2016	115.118.953	13,22
14	2017	142.495.390	23,78
15	2018	131.711.751	-7,57
16	2019	168.032.651	27,58
17	2020	228.254.826	35,84
18	2021	247.697.935	8,52
19	2022	166.386.113	-32,83
20	2023	210.796.884	26,69
Rata-rata			18,82

Sumber: Pemerintah Kab. HSS dan BPS Kab HSS, diolah kembali

Simulasi Dampak Kenaikan Belanja Modal terhadap PDRB dan PAD

Skenario Belanja Modal (%) Pertumbuhan PDRB (%) Kenaikan PAD (%)			
A	21	5,3	8
B	25	5,9	16
C	30	6,5	25

- Pertumbuhan PDRB naik dari 5,3% ke 6,5%, menandakan peningkatan kapasitas output ekonomi daerah.
- Pertumbuhan PAD meningkat dari 6% ke 10%, menggambarkan efek *crowding-in* di mana investasi publik menstimulasi aktivitas ekonomi lokal.

Pola ini memperkuat argumen bahwa alokasi belanja modal produktif memiliki elastisitas tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemandirian fiskal daerah. Penerapan *zero-based budgeting* dan *Medium-Term Expenditure Framework* (MTEF) menjadi strategi penting agar alokasi belanja diarahkan ke program produktif.

Kedua, optimalisasi PAD tanpa menaikkan tarif pajak. Pemerintah dapat meningkatkan penerimaan melalui intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi berbasis data digital. Penertiban wajib pajak kendaraan, hotel, restoran, serta pemanfaatan aset daerah yang belum produktif dapat menambah penerimaan tanpa menambah beban masyarakat.

Ketiga, penguatan peran BUMD dan kemitraan publik swasta (*Public-Private Partnership/PPP*). BUMD harus diubah menjadi motor pendapatan dengan mendorong efisiensi, diversifikasi usaha, dan kerja sama dengan swasta, khususnya pada sektor pangan, energi, dan logistik. Skema PPP memungkinkan proyek strategis tetap berjalan tanpa membebani APBD, asalkan dikelola secara transparan dan akuntabel.

Analisis integratif atas data 2021–2023 menunjukkan bahwa:

- Efisiensi fiskal belum optimal, meskipun tren belanja modal meningkat.
- Pertumbuhan ekonomi stabil tetapi belum inklusif, dengan kontribusi sektor produktif masih terbatas.
- Indikator sosial membaik signifikan, ditandai oleh IPM tinggi dan ketimpangan rendah.
- Ketergantungan terhadap DAU masih dominan, menuntut inovasi PAD dan efisiensi belanja.

Masalah Kebijakan

Kinerja fiskal Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) selama dua dekade terakhir menunjukkan peningkatan signifikan dari sisi besaran anggaran, namun belum sepenuhnya diikuti dengan percepatan pertumbuhan ekonomi yang sepadan. Kenaikan belanja daerah belum mampu memberikan dampak pengganda yang kuat terhadap perekonomian lokal, sementara ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya *growth inconsistency* dan keterbatasan efektivitas kebijakan fiskal daerah.

Masalah utama yang dihadapi pemerintah daerah terletak pada komposisi belanja yang masih didominasi oleh belanja operasional sekitar 75 persen dari total anggaran, sementara ruang untuk belanja modal produktif relatif kecil. Ketimpangan tersebut mengakibatkan investasi publik yang bersifat jangka panjang—seperti pembangunan infrastruktur dasar, penguatan industri lokal, dan peningkatan kualitas layanan publik—belum memperoleh porsi anggaran yang memadai.

Selain itu, struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, sedangkan kontribusi PAD hanya berkisar 12–15 persen dari total pendapatan daerah. Ketergantungan fiskal ini membatasi ruang inovasi dan fleksibilitas daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, persoalan kebijakan utama yang harus dijawab adalah bagaimana pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja publik untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan di tengah keterbatasan fiskal dan tantangan penurunan transfer pusat.

Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Jangka Pendek – Menengah)

- Percepatan realisasi APBD
- Percepatan realisasi investasi (PMA dan PMDN)
- Percepat realisasi proyek infrastruktur (belanja modal yang produktif)
- Pengendalian harga – inflasi
- Peningkatan produktifitas pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan industri berbasis potensi lokal.
- Perluasan kesempatan kerja.
- Mempermudah perizinan berusaha.

Rekomendasi Utama 2025–2029:

- Tingkatkan belanja modal produktif hingga 30% dari APBD.
- Terapkan digitalisasi PAD dan *performance-based budgeting*.
- Perkuat sinergi Banteng Raya untuk konektivitas ekonomi.
- Fokus pada transformasi pertanian, industri kecil, dan jasa sosial.
- Bentuk *Fiscal Innovation Unit* di bawah Bappeditbangda untuk monitoring efektivitas belanja. Unit atau tim khusus yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mendorong terobosan dan pembaruan dalam pengelolaan keuangan publik (fiskal), mengembangkan ide, kebijakan, dan instrumen baru dalam bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, agar meningkatkan kemandirian fiskal, memperkuat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, dan mengembangkan model pembiayaan inovatif di luar ketergantungan pada transfer pusat (seperti DAU dan DAK).